

The National Identity of The Kingdom of Saudi Arabia In History and Government

Identitas Nasional Kerajaan Arab Saudi Dalam Sejarah Dan Pemerintahan

Riskawati^{1*}, Muh. Herisman²

^{1,2}Universitas Negeri Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received: September 22, 2025

Revised: October 22, 2025

Accepted: November 25, 2025

Kata Kunci:

Identitas Nasional; Pemerintahan;
Kerajaan Arab Saudi

Keywords:

National Identity; Government;
Kingdom of Arab Saudi



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjalanan sejarah, sistem pemerintahan, Identitas nasional serta nilai-nilai kewarganegaraan yang membentuk karakter bangsa Arab Saudi. Dengan menggunakan metode kajian literatur yang mendalam dari berbagai buku dan jurnal internasional menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki peran penting dalam sejarah dan peradaban Islam dunia. Arab Saudi di kenal sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan berdirinya dua kota suci umat Islam, yaitu Mekkah dan Madinah. Didirikan pada tahun 1932 oleh Raja Abdulaziz bin Saud, Arab Saudi merupakan negara monarki absolut yang berlandaskan pada syariat Islam dan menganut mazhab Hanbali. Hubungan antara agama dan negara di Arab Saudi sangat erat, terutama dengan pengaruh ajaran Muhammad ibn Abd al-Wahhab yang menjadi dasar legitimasi keagamaan Kerajaan. Nilai-nilai agama islam sebagai identitas nasional sangat mempengaruhi karakter

Masyarakat Arab Saudi, termasuk dalam bidang pendidikan. Hukum islam sebagai konstitusi negara menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai sumber acuan dalam menjalankan Negara. Dengan mempertahankan fondasi agama sebagai dasar ideologi nasional, Arab Saudi tidak hanya memperkuat posisinya sebagai pusat spiritual dunia Islam, tetapi juga sebagai aktor penting dalam sosial global kontemporer.

ABSTRACT

This research aims to comprehensively understand the historical journey, government system, national Identity, and civic values that shape the character of the Saudi Arabian nation. By using in-depth literature review methods from various international books and journals, it shows that Saudi Arabia has an important role in the history and civilization of Islamic world. Saudi Arabia is known as the birthplace of the Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) and the founding of the two holy cities of Islam, namely Mecca and Medina. Founded in 1932 by King Abdulaziz bin Saud, Saudi Arabia is an absolute monarchy based on Islamic law and adheres to the Hanbali school of thought. The relationship between religion and state in Saudi Arabia is very close, especially with the influence of the teachings of Muhammad ibn Abd al-Wahhab which is the basis of the Kingdom's religious legitimacy. Islamic religious values as a national identity greatly influence the character of Saudi Arabian society, including in the economic and educational sectors. Islamic law as the state constitution makes the Al-Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a source of reference in running the State. By maintaining religious foundations as the basis of national ideology, Saudi Arabia not only strengthens its position as the spiritual center of the Islamic world, but also as an important actor in contemporary global society.

PENDAHULUAN

Arab Saudi, secara resmi disebut Kerajaan Arab Saudi (Kingdom of Saudi Arabia/KSA), merupakan negara Arab di Asia Barat yang hampir seluruh wilayahnya

*Corresponding author

E-mail addresses: riskawatibintuluqman@unm.ac.id

mencakup Semenanjung Arabia. Secara geografis, negara ini adalah yang terbesar kelima di Asia serta terbesar kedua di kawasan Dunia Arab setelah Aljazair. Di bagian utara, Arab Saudi berbatasan dengan Yordania dan Irak; di timur laut dengan Kuwait; di timur dengan Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab; di tenggara dengan Oman; dan di selatan dengan Yaman. Sementara itu, Teluk Aqaba memisahkannya dari Israel dan Mesir. Arab Saudi juga menjadi satu-satunya negara yang memiliki dua garis pantai strategis, yakni di Laut Merah dan Teluk Persia, dengan sebagian besar wilayahnya berupa bentangan gurun pasir.

Wilayah Arab Saudi saat ini berasal dari empat kawasan historis, yaitu Hejaz, Najd, serta sebagian wilayah Arabia Timur (Al-Ahsa) dan Arabia Selatan ('Asir). Kerajaan ini resmi dibentuk pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud, yang menyatukan keempat wilayah tersebut melalui serangkaian penaklukan yang dimulainya pada 1902, dengan Riyadh—kampungan halaman keluarga Wangsa Saud—sebagai ibu kota. Arab Saudi menganut sistem monarki absolut yang berlandaskan pada syariat Islam. Negara ini juga dikenal sebagai "Tanah Dua Masjid Suci," merujuk pada Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, dua situs tersuci dalam Islam. Populasinya berjumlah sekitar 28,7 juta jiwa, terdiri dari 20 juta warga Saudi dan sekitar 8 juta penduduk asing. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Arab Saudi memiliki kedudukan penting dalam dunia Islam sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad dan pusat awal penyebaran agama Islam, yang tercermin dalam benderanya yang memuat dua kalimat syahadat: "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya."

Arab Saudi, dengan Riyadh sebagai ibu kotanya, adalah negeri tempat lahir Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah di wilayah Hijaz menjadi lokasi pertama kali Islam diperkenalkan oleh Rasulullah, sementara Madinah berperan sebagai pusat perkembangan Islam pada masa Nabi dan para Khulafaur Rasyidin. Mekah, sebagai tempat kelahiran Nabi, memiliki kedudukan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Di kota ini berdiri Masjidil Haram dan Ka'bah, arah kiblat seluruh umat Islam ketika menunaikan salat. Setiap tahun, jutaan Muslim datang ke kota ini untuk melaksanakan ibadah haji. Faktor-faktor tersebut menjadikan Arab Saudi memiliki posisi sangat penting dalam dunia Islam. Secara geografis, Arab Saudi meliputi sekitar empat perlima wilayah Semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di kawasan Asia Barat. Titik terendahnya berada di pesisir Teluk Persia pada ketinggian 0 meter, sedangkan titik tertingginya berada di Jabal Sauda' yang mencapai 3.133 meter. Negara ini didominasi bentang alam datar dan padang pasir luas, termasuk gurun di bagian selatan yang dikenal sebagai Rub' al-Khali atau "Daerah Kosong," salah satu gurun terbesar di dunia.

Di bagian barat daya Arab Saudi terdapat kawasan pegunungan yang hijau dan dipenuhi rerumputan. Meskipun negara ini hampir tidak memiliki sungai maupun danau permanen, banyak wadi yang tersebar di berbagai wilayah. Daerah-daerah subur umumnya ditemukan pada endapan aluvial di sepanjang wadi, cekungan, dan oasis. Sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan atau monarki konstitusional, sebagaimana tercermin dari nama resminya, "Kerajaan Arab Saudi." Dalam perspektif sejarah, salah satu hal penting mengenai Arab Saudi adalah hubungan simbiotik antara negara ini dan ajaran Syekh Abdul Wahhab. Ajaran tersebut membutuhkan institusi politik untuk memperluas pengaruhnya, sementara Arab Saudi memerlukan legitimasi keagamaan sebagai dasar kekuasaan. Kedua kepentingan inilah yang kemudian membentuk karakter perjalanan sejarah Arab Saudi. Sejak munculnya gerakan keagamaan yang diprakarsai Muhammad ibn Abd al-Wahhab, hubungan agama dan negara menjadi sangat erat. Setelah memiliki

kekuatan politik dan militer, gerakan ini secara sistematis menyingkirkan hal-hal yang dianggap sebagai sumber berkembangnya praktik bid'ah dalam Islam, dengan madzhab Hanbali sebagai rujukan resmi negara. Pada titik inilah, dinamika perkembangan Islam di Arab Saudi menjadi menarik untuk dikaji.

Meskipun kondisi geografis dan politik Arab Saudi telah banyak dibahas dalam literatur, aspek yang lebih fundamental dalam memahami negara ini adalah bagaimana identitas nasional dibangun dan dipertahankan. Identitas nasional menurut (Anderson, 2020) merupakan komunitas terbayang yang dibentuk melalui konstruksi historis, narasi kolektif, dan simbol budaya. Sementara (Smith, 1999) menegaskan bahwa identitas nasional dibangun melalui enam elemen utama: mitos asal-usul, memori sejarah, budaya bersama, nilai-nilai, teritori, dan solidaritas. Sementara (Gellner, 2015) menekankan peran negara dan institusi modern dalam menghomogenkan budaya dan membentuk identitas nasional. Dalam konteks Arab Saudi, konstruksi identitas nasional tidak dapat dipisahkan dari aliansi historis antara keluarga Saud dan gerakan Wahhabiyah yang dirintis oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Aliansi ini membentuk dasar ideologis negara di mana agama dijadikan sumber legitimasi utama bagi kekuasaan politik. Di satu sisi, ajaran Wahhabi memperoleh dukungan struktural untuk menyebarkan puritanisme Islam; di sisi lain, keluarga Saud memperoleh legitimasi religius untuk membangun pemerintahan dan melakukan ekspansi wilayah (Al-Rasheed, 2010; Commings, 2005). Relasi simbiotik ini menjadi pilar historis dalam pembentukan identitas nasional Saudi hingga era modern.

Identitas nasional Arab Saudi juga diperkuat melalui simbol-simbol keagamaan, seperti dua kota suci Makkah dan Madinah, penggunaan syahadat pada bendera negara, serta gelar Khadim al-Haramain al-Syarifain yang disematkan kepada raja. Identitas religius ini tidak hanya membedakan Arab Saudi dari negara-negara Arab lainnya, tetapi juga memberikan status moral dan simbolik bagi kerajaan dalam dunia Islam. Dengan demikian, identitas nasional Saudi merupakan perpaduan antara tradisi Islam puritan, legitimasi monarki, dan narasi sejarah tentang penyatuan wilayah.

Dalam perkembangan kontemporer, terutama sejak peluncuran Saudi Vision 2030, muncul transformasi besar pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Modernisasi ini memunculkan dinamika baru dalam identitas nasional Arab Saudi yang kini dirancang untuk lebih progresif, inklusif, dan berorientasi global (Ramady, 2018). Hal ini menimbulkan ketegangan antara nilai tradisional dan agenda modernisasi, sehingga kajian identitas nasional Saudi menjadi semakin relevan dan kompleks. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji identitas Kerajaan Arab Saudi, baik dari segi Sejarah pemerintahan, identitas nasional, politik, pendidikan dan nilai-nilai Kewarganegaraan yang mempengaruhi karakter bangsanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan kajian Pustaka atau *Library Research*. Penelitian Pustaka merupakan penelitian yang menggunakan buku, jurnal serta majalah-majalah yang berkaitan dengan kajian penelitian yang di angkat sebagai data primer untuk dijadikan sebagai sumber referensi (Denzin & Lincoln, 2011). Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki focus penelitian pada buku serta kajian Pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan (Zed, 2008).

Jenis Penelitian yang digunakan dalam kajian ini Adalah penelitian kualitatif, sehingga dapat menghasilkan informasi data deskriptif. Dalam penelitian kualitatif

dibutuhkan analisis deskriptif sehingga dapat memberikan penjelasan dan juga gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan juga kritis tentang identitas Nasional Kerajaan Arab Saudi dalam Sejarah dan Pemerintahan. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa buku-buku yang secara khusus membahas tentang Sejarah Kerajaan Arab Saudi, serta sumber data sekunder berupa buku penunjang dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Nasional

Indonesia Kerajaan Arab Saudi memiliki Ibu kota Negara yaitu Riyadh dengan Luasnya 1.600 km², penduduk 6,125,180 juta tahun 2015 dan merupakan kota terbesar. Hari nasional jatuh pada tanggal 23 September, diperingati sebagai hari bersatunya Kerajaan Arab Saudi tahun 1932 yang dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud sebagai raja pertama, yang mana lagu kebangsaannya adalah Al-Salam al-Malakiy (Salam Kerajaan), dengan bendera Negara Berwarna hijau dengan tulisan Arab berwarna putih "La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah" yang berarti: "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah" yang terletak di atas sebilah pedang dengan ujung menghadap tiang. Lambang Negara adalah Pohon kurma diapit oleh dua bilah pedang yang terletak bersilangan. Kurma melambangkan pertumbuhan dan kemakmuran, sedangkan pedang melambangkan keadilan dan kekuatan, Bahasa resmi nasional adalah bahasa arab (Konsulat Jendral Republik Indonesia, Jeddah kerajaan Arab Saudi, 2015).

Dari situs resmi kementerian luar negeri (2015), Agama yang dianut penduduk Arab Saudi adalah Islam (100%). Mayoritas penduduk adalah Sunni dengan mazhab fikih Hanbali. Pengikut Syah sekitar 5% kebanyakan di wilayah timur: Qatif, Sayhat, Safwu (dekat Dammam), dan Al-Hasa (dekat Hoffuf). Arab Saudi memiliki dewan fatwa, beranggotakan para ulama yang konsen membidangi masalah keagamaan sebagai rujukan pemerintah terkait fatwa dalam hukum agama. Sehingga, Kerajaan Arab Saudi dikenal sebagai negara islam yang menggunakan hukum islam sebagai sumber legitimasi bagi rezim Arab Saudi. Penggunaan agama oleh keluarga kerajaan untuk mengkonsolidasikan identitas nasional Saudi, yang pada gilirannya akan menjadi atribut tambahan untuk legitimasi dinasti yang berkuasa. Dalam sejarah muslim,, hubungan antara agama dan Negara dapat diperkenalkan dengan 2 cara yaitu: (a) sumber daya dan aparatur negara digunakan untuk mempromosikan Islam, seperti pada zaman Nabi Muhammad dan empat orang pertama *Khalifah* yaitu Abu bakar ash-shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affam dan Ali bin abi thalib; dan (b) islam dimobilisasi untuk melindungi Negara (Nevo, 1998a). Dalam pemerintahan Saudi, tidak menggunakan partisipasi politik barat yang sekuler, sebab agama telah memberikan legitimasi utama dalam pemerintahan kerajaan arab Saudi. Olehnya, identitas nasional telah tercermin dalam ketaatan terhadap islam dan kesetiaan terhadap pemerintah yang berkuasa.

Hukum konstitusional Saudi dan sistem peradilanannya bertumpu pada prinsip-prinsip hukum Islam tradisional; *Al-Qur'an* dan *Sunnah* membentuk konstitusi dan *fiqh* islam yang mendukung hukum Negara,(F. Vogel, 2014). Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wassalam*, Pada tahun 1992 ditetapkan Basic Law of Government yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Hukumnya Berdasarkan hukum Islam (Syariah) yang bersumber dari Kitab

Suci Al-Qur'an & Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak memiliki partai politik. (Konsulat Jendral Republik Indonesia, Jeddah kerajaan Arab Saudi, 2015).

Arab Saudi merupakan negara dengan bentuk monarki absolut yang masih bertahan sampai saat ini di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi diresmikan sebagai Kerajaan Arab Saudi oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud pada tahun 1932. Sejak saat itu, rezim Al Saud menjadi penguasa di Arab Saudi sampai sekarang. Raja Saudi merupakan pengambil keputusan yang utama yang mewakili semua kepentingan masyarakatnya, baik kepentingan di dalam negeri maupun kepentingan keluar, Raja Saudi diganti secara turun-temurun oleh keturunan al Saud lainnya. Menurut kebiasaan dan konvensi politik yang berlaku di lingkungan Monarki Arab Saudi, pergantian kekuasaan Raja Saudi dilakukan setelah wafat, dan umumnya raja pengganti berdasarkan senioritas. Putera mahkota dalam hal ini berkedudukan sebagai calon pengganti raja. Sementara tugas pemimpin menurut imam Al-Ghazali yaitu menjadi komandan tentara Muslim dan memimpin semua perayaan keagamaan formal. Namun yang paling penting, penguasa harus, antara lain, seorang lelaki Muslim yang matang, seorang yang adil, memiliki pengetahuan agama dan mampu membuat penilaian independen terhadap poin-poin hukum seperti yang diperintahkan oleh *syariah*. Dengan kata lain, *siyasa* atau pemerintahan harus mengakomodasi *syari'ah* (hukum Islam), yang dikenal dalam literatur Islam klasik sebagai *siyasa shar'iyya*. (Al-Atawneh, 2009). Arab Saudi tidak mempunyai konsitusi sebagaimana umumnya sebuah Negara, Konstitusi Arab Saudi adalah Al Quran.

Wilayah Arab Saudi merupakan yang terluas di kawasan Timur Tengah dengan luas kawasannya yaitu 2.149.690 km². (CIA:Central Intelligence Agency, 2017). Arab Saudi mempunyai dua kota suci umat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Dua kota ini menjadikan Arab Saudi dikunjungi jutaan umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, Arab Saudi pada dasarnya adalah monarki absolut, Islam kesatuan yang didirikan dan dilegitimasi oleh ajaran Islam. The Holy *Qur'an* dan *Sunnah* yang dinyatakan Konstitusi, dan *Syariah* berfungsi sebagai hukum yang mengatur tanah. Sebagai salah satu dari beberapa raja absolut yang tersisa di dunia kontemporer (Ismail et al., 2016).

Dalam Negara ini, islam telah memainkan peran penting yang tidak hanya membentuk identitas pribadi dan kolektif individu tetapi juga dalam mengkonsolidasikan nilai-nilai nasionalnya yaitu Alquran dan *syariah* yang merupakan sumber hukumnya. Hal ini didukung dengan pendapat Ibnu Taimiyah (wafat 1.328) yang menegaskan bahwa pemerintah Islam diperlukan dan diwajibkan untuk menerapkan hukum Islam, dengan demikian memastikan keadilan dalam masyarakat melalui praktik doktrin mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Murid Ibn Taymiyya Ibn Qayyim al-Jawziyya (wafat 1350) melanjutkan dengan berpendapat bahwa politik adalah bagian dari agama, karena pemerintah Islam diperlukan untuk melindungi nilai-nilai agama, sementara sumber perundang-undangan duniawi yang dikenal dengan istilah hukum dan legislator dilarang karena menyiratkan diberlakukannya undang-undang gaya barat. Mereka diganti dengan *nizam* (peraturan) dan *marsum* (dekrit), yang seharusnya melengkapi *syariah*, bukan untuk menggantikannya (Nevo, 1998a).

Kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 dan penguasa dengan cepat menyatakan Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi negeri ini. Intinya, tradisi Nabi Muhammad membingkai gaya hidup Arab Saudi dan Islam diakui sebagai satu-satunya agama yang dapat diterima. Faktanya, hukum Syariah menjadi hukum resmi dalam sistem

pengadilan. Muslim harus mengikuti hukum Syariah. Syariah adalah suatu badan keputusan yang kompleks dan terus berkembang yang belum dimodifikasi. Tujuan syariah adalah untuk membimbing umat Islam, jika mereka setia pada perintah Allah, akan mencapai surga. Dasar penilaian hukum Islam ditemukan dalam Al Qur'an, tetapi di mana ia tidak memberikan panduan khusus, umat Islam berkonsultasi dengan "hadits". Teks-teks pendek ini berhubungan dengan praktik, perilaku, ucapan, dan keyakinan Nabi, dan kadang-kadang dari istri atau sahabatnya (Zuhur, 2011).

Jika yang kita ketahui nasionalisme dikaitkan dengan modernisasi dan sekularisasi, yaitu bentuk cinta masyarakat terhadap Negara, namun di Arab Saudi, agama dan kesetiaan terhadap raja atau pemerintah yang berkuasa merupakan komponen penting dalam identitas Negara. Rezim Saudi juga memperkenalkan symbol-simbol Negara seperti lagu kebangsaan dan bendera yang bermotif Islam dengan mencerminkan kereligiusannya. Menggunakan Islam sebagai sumber legitimasinya, Konsep ini bahwa identitas Arab Saudi adalah bagian dari bangsa/umat dan berulang kali digarisbawahi oleh juru bicara rezim di negara ini. Karena itu, agama telah memainkan peran penting tidak hanya dalam membentuk identitas pribadi dan kolektif individu tetapi juga dalam mengkonsolidasikan nilai-nilai nasionalnya. Olehnya cendekiawan Muslim tradisional dan modern percaya bahwa agama dan negara tidak bisa di pisahkan. Pemerintah dianggap vital, karena tugasnya yang tinggi untuk melindungi agama dan nilai-nilai Islam.

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz atau lebih dikenal dengan syekh bin Baz, beliau pernah menjabat sebagai mufti atau penasihat kerajaan dan merupakan salah satu orang yang berpengaruh di kerajaan Arab Saudi. Ibn Baz berpendapat, bahwa istilah ibadah (*'ibada*) mencakup semua tindakan manusia, baik eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, seseorang harus sepenuhnya tunduk pada kehendak Tuhan karena itu memanifestasikan dirinya khususnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena alasan ini, Alquran jauh lebih dari sekadar sumber tertinggi Islam *corpus juris*; namun ia adalah sumber inspirasi yang konstan dan merupakan konstitusi abadi, sesuai untuk setiap waktu dan tempat, dengan demikian, mengandung semua prinsip dasar hukum Islam dan menyediakan platform untuk mengembangkan norma-norma politik, hukum dan moral. (Al-Atawneh, 2009). Kekuatan otoritas kerajaan Arab Saudi tidak hanya berasal dari hukum agama semata, namun juga dari struktur sosial dan norma-norma budaya yang telah lama ada. Namun secara politis, tujuan pemerintahan dalam Islam adalah untuk melestarikan *syariah* dan untuk menegakkan ketentuannya. Untuk mempertahankan dan menegakkan *syariah*, diperlukan penguasa sementara dan kepatuhan padanya adalah kewajiban agama.

Hal diatas jelas disampaikan dalam Qs. An-nisa:59 bahwa "*wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan 'ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya*". (Tafsir Quran, 2011). Namun demikian, orang beriman sama-sama berkewajiban untuk tidak mematuhi penguasa atau orang yang berwenang jika perintahnya melanggar *syariah*: 'Jika Dekrit yang dikeluarkan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, baik para *ulama* maupun para penguasa tidak seharusnya dipatuhi. (Al-Atawneh, 2009) Maksudnya, patuh terhadap penguasa yang berdaulat adalah kewajiban dalam agama Islam selama penguasa tersebut tidak memerintahkan pada kebatilan atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh

karena itu, *syariah* membutuhkan komitmen dan penegakan penguasa, sementara negara membutuhkan *syariah* untuk legitimasinya. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh agama, termasuk dalam bidang pendidikan.

Sebagai contoh, Pendidikan agama ditekankan di semua tingkat pendidikan di Arab Saudi. Tujuan pendidikan dalam Negara tersebut adalah menekankan pentingnya menciptakan rasa kesetiaan dan kepatuhan, serta tugas menyebarkan pesan dan mempertahankannya. Pendidikan harus mempromosikan semangat kesetiaan kepada hukum Islam dengan menghindari sistem atau teori apa pun yang bertentangan dengannya. Berperilaku dengan kejujuran dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan harus mampu membangkitkan semangat perjuangan Islam, mengembalikan hak-hak Islam, melanjutkan kembali perjuangan bangsa yang mulia. dan memenuhi misi Islam serta memproyeksikan persatuan umat Islam. Mata pelajaran agama utama yang diajarkan di sekolah-sekolah Saudi adalah: Al-Qur'an, Tauhid (pernyataan keesaan Tuhan), Tajwid (pembacaan), Tafsir (penafsiran, komentar pada Al-Qur'an), Hadits (catatan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad dan para sahabatnya) dan Fiqh (Yurisprudensi Islam). Sebagian besar mata pelajaran ini terus diajarkan di tingkat universitas. Sekitar 30% jam mingguan di sekolah dasar didedikasikan untuk pelajaran agama, di sekolah menengah proporsinya adalah 24% dan di sekolah menengah atas sekitar 35% untuk para siswa di cabang Syariah dan Arab serta sekitar 14% untuk mereka yang berada di cabang teknis dan ilmu alam. Kelas sejarah (sejarah peradaban Islam, sejarah kehidupan Nabi dan sastra yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam) (Prokop, 2003).

Olehnya sejak awal di Arab Saudi, Islam telah menjadi faktor yang ada di mana-mana dan dominan dalam kehidupan publik. Legitimasi dinasti dan elite yang berkuasa bersandar pada dasar agama. Sudah menjadi tugas mereka untuk melaksanakan perintah-perintah iman, untuk menegakkan moralitas dan keadilan, dan untuk mendukung dan mengawasi kejadian-kejadian religius seperti ziarah ke Mekah. Menurut Saudi, konstitusi negara terus dan selamanya adalah Alquran. Bendera Arab Saudi juga telah secara grafis dan dramatis menunjukkan peran Islam di negara itu. Bendera itu memuat deklarasi agama Islam dan pedang-pedang yang bersilang menandakan dukungan militer untuk Islam. Daerah, suku, dan kota yang sangat berbeda telah disatukan oleh agama yang sama serta oleh kebijakan politik keluarga kerajaan (William ochsenwald, 1981). Identitas negara oleh sebagian muslim Arab di timur tengah menyebutkan tiga elemen yaitu: Islam, Arab, dan nasional dalam pengertian local (yang mencakup suku, budaya dan geografis) (Nevo, 1998a).

Perkembangan Sejarah Arab Saudi

Awal perjuangan dalam mendirikan kerajaan Arab Saudi dimulai tahun 1157 H, saat pertemuan antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan pemerintahan Dir'iyah Muhammad bin Su'ud. Sebelumnya, Perjuangan Muhammad bin Abdul Wahhab dimulai saat dirinya bertekad untuk mengembalikan kekuatan Islam (ajaran Rasulullah) ditengah banyaknya kesyirikan yang merajalela di negeri Arab. Beliau dengan segala kekuatan dan tekad yang besar mendatangi beberapa wilayah Arab untuk menyampaikan dakwahnya. Tahun 1144, Abdul Wahhab mendatangi daerah Najed, namun dakwah beliau tidak mendapatkan penerimaan oleh masyarakat setempat, hingga tahun 1149 beliau meninggalkan kota tersebut. Tidak sampai disitu, perjuangannya terus berlanjut di beberapa daerah hingga

sampai pada tahun 1154 H beliau memasuki daerah Uyainah dan mendapatkan sambutan penerimaan oleh penguasa Uyainah Utsman Bin Mu'ammār. Dakwah beliau diterima oleh masyarakat setempat dengan mengajak mereka kembali kepada kemurnian Islam yaitu Tauhid dan syirik, menebang pohon-pohon thogut, shalat di masjid bagi laki-laki hingga menerapkan hukum Islam seperti hukuman rajam bagi wanita pezina.

Namun setiap perjuangan selalu saja ada tantangan. Hal ini terlihat bahwa mereka dahulu tidak menentang garis dakwah yang disampaikan oleh syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan Tauhid dan syirik. Akan tetapi, begitu beliau mengamalkan dan mempraktekkan dakwah tersebut serta merta mereka menyelisihi dan menentangnya. Karena merasa resah dengan dakwah syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masyarakat mempengaruhi Utsman Bin Mu'ammār untuk mengusir beliau. Hingga pada akhirnya syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad bin Su'ūd dan bersama-sama memperjuangkan kemurnian Islam, mereka mulai membuat strategi untuk mengajak para pemimpin wilayah-wilayah di daerah Arab untuk bersatu dengan cara mengirimkan surat kepada mereka. Banyak yang menerima ajakan tersebut karena melihat kuatnya kepemimpinan Muhammad bin Su'ūd di daerah Dir'iyyah, namun tidak sedikit juga yang menolak, termasuk kalangan Turki Utsmani di Mesir.

Se meninggal Muhammad bin Su'ūd tahun 1179 H, perjuangannya dilanjutkan oleh putra mahkota yaitu Abdul Azis Bin Muhammad Bin Su'ūd. Lalu kemudian Abdul Azis digantikan oleh putranya yang bernama Su'ūd bin Abdul Azis. Saat itulah kerajaan Arab Saudi menuai banyak kemenangan dan menjadi wilayah yang kaya raya karena kekuatan dan kecerdasan pemimpinnya. Tahun 1226 H terjadi pertempuran antara Turki Utsmani dengan kerajaan Arab Saudi dengan hasil kemenangan yang memuaskan. Hingga tahun 1229 H, Su'ūd Bin Abdul Azis meninggal dan perjuangan beliau dilanjutkan oleh putranya Abdullah bin Su'ūd untuk melawan Turki Utsmani. Namun Abdullah bin Su'ūd tidak sekuat ayahnya, yang menyebabkan Arab Saudi melemah. Dan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1233 H atau bertepatan dengan tanggal 9 September 1818, kerajaan Arab Saudi jatuh ditangan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha. Dengan penyerahan diri ini berakhirlah pertahanan terakhir dari berbagai pertahanan dan pembelaan yang penuh heroik dan jiwa kepahlawanan yang ditunjukkan oleh pasukan dinasti Saudi. Setelah itu Abdullah bin Su'ūd, sosok yang dikenal dengan ketabahan dan keberaniannya yang kuat, dikirim ke Mesir untuk bertemu dengan Muhammad Ali Pasha. Dari Mesir ia dibawa ke ibukota Turki Utsmani. Di ibukota tersebut ia diadili dengan pengadilan buatan yang akhirnya dibunuh pada bulan Shafar tahun 1234 H (Utsaimin, 2012a)

Meskipun negara Saudi pertama dihancurkan pada tahun 1818-an oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir dan yang kedua oleh perang saudara dan Rashidis of Hail pada tahun 1880-an, aliansi agama Arab Saudi-pusat dibangun kembali berkuasa pada tahun 1900-an oleh Abd al -Aziz ibn Saud (1879-1953). Dengan menggunakan daya tariknya sebagai pahlawan militer dan penegak doktrin agama, Abd al-Aziz mengalahkan Ottoman, Rashidi, Hasyimim Hijaz, dan Yaman. Sebagian besar keberhasilan militernya diraih oleh Ikhwan, kelompok-kelompok Muslim yang menetap yang dipersatukan oleh ikatan keagamaan yang penuh kesetiaan kepada Wahhabisme. Pada 1932 Kerajaan Persatuan Arab Saudi diumumkan. Meskipun pemuja karismatik dinasti Saudi ini meninggal pada tahun 1953, kekuasaan dan kekuasaan politik tetap berada di tangan keluarganya.

a. Raja Abdul Aziz Ibnu Saud (1932-1953)

Fenomena parkir liar di Kota Makassar juga dapat dilihat sebagai cerminan marjinalitas urban yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Marjinalisasi ini terjadi ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan ruang kota, sehingga mereka terpaksa mencari cara alternatif untuk bertahan hidup. Dalam konteks parkir liar, hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan dan regulasi yang ada sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan realitas kehidupan masyarakat yang lebih rentan. Abdul Aziz Ibnu Saud dilahirkan di Riyadh pada bulan November 1880 dan merupakan anak pasangan Abdul Rahman ibn Faisal dan Sara binti Ahmad al-Kabir Sudayri. Ia kemudian memulai kampanye untuk merebut kembali tanah keluarganya dari dinasti Rashidi di tempat yang kini merupakan Arab Saudi. Hal ini didasari karena pada tahun 1891 ia bersama ayahnya harus menyingkir ke daerah Kuwait karena kedudukannya di Riyadh direbut oleh Muhammad bin Rasyid sebagai kepala suku.⁸ Pada tahun 1902, beliau bersama-sama dengan pasukan keluarga dan saudaranya berhasil merebut Riyadh dengan membunuh Gubernur Rashidi di sana. Pada tahun 1912, Ibnu Saud berhasil menguasai Nejed dengan bantuan Gerakan Wahabi.

Pada tahun 1922 Ibnu Saud berhasil mengalahkan Dinasti Rashidi dan ini mengakhiri penguasaan Dinasti Rashidi di Tanah Arab. Pada tahun 1925, Ibnu Saud berhasil merebut Kota Suci Makkah dari Syarif Hussain bin Ali. Pada 10 Januari 1926, Ibnu Saud dinobatkan menjadi Raja Hijaz di Masjidil Haram, Mekah. Pada tahun 1932, setelah menguasai sebagian besar Jazirah Arab dari musuh-musuhnya, Ibnu Saud menamakan tanah gabungan Hijaz dan Nejd sebagai Arab Saudi. Pada tahun 1932 ditemukan sumber-sumber minyak bumi sehingga tanah-tanah tandus tadi berubah menjadi daerah makmur dan kaya raya. Dengan penghasilan negara yang tinggi itu Ibnu Saud membangun negaranya dengan membuka jalan-jalan raya, mendirikan pemancar radio, memasang jaringan telfon, membangun perkampungan baru dan lain lain. Penduduk-penduduk perkampungan itu dilepaskan dari ikatan suku dan diikat dengan ikatan persaudaraan yang bernama Ikhwan (Utsaimin, 2012a)

b. Raja Saud, putra Raja Abdul Aziz Ibnu Saud (1953-1964)

Saud ibn 'Abd al-'Aziz al-Sa'ud (12 Januari 1902- 23 Februari 1969) ialah Raja Arab Saudi dari tahun 1953 sampai 2 November 1964. Ia adalah anak sulung Raja Ibnu Saud. Ia kemudian dilantik menjadi putera mahkota pada 11 Mei 1933 dan dinobatkan menjadi raja setelah ayahnya mangkat pada tahun 1953. Semasa pemerintahannya banyak kantor pemerintahan didirikan di samping pendirian Universitas Raja Sa'ud di Riyadh. Sebuah perebutan kekuasaan oleh keluarganya sendiri terjadi pada tahun 1964 dengan disokong oleh golongan ulama. Walaupun Muhammad ibn Abdul Aziz Al Sa'ud merupakan pewaris tahta yang paling layak namun dia enggan menerimanya dan sebaliknya menyokong pengangkatan adik tirinya yaitu Faishal ibn Abdul Aziz Al Sa'ud sebagai raja. Raja Sa'ud kemudian ke Jenewa, Swiss setelah diusir keluar dari Arab Saudi. Pada tahun 1966, Raja Sa'ud telah dijemput oleh Presiden Gamal Abdel Nasser untuk tinggal di Mesir. Ia meninggal dunia di Athena, Yunani pada tahun 1969.

c. Raja Faisal, putra Raja Abdul Aziz ibnu Saud (1964-1975)

Raja Faisal lahir di Riyadh dan merupakan anak keempat Raja Abdul Aziz Al Saud. Selepas skandal keuangan Raja Saud, Pangeran Faisal dilantik menjadi pemerintah sementara. Pada tanggal 2 November 1964, ia dilantik menjadi raja. Raja Faisal melakukan banyak reformasi sewaktu menjadi raja, diantaranya adalah memperbolehkan anak-anak perempuan bersekolah, televisi, dan sebagainya. Usahanya ini mendapat tentangan dari berbagai pihak karena perkara-perkara ini dianggap bertentangan dengan Islam. Ia merasa amat kecewa saat Israel memenangkan Perang Enam Hari pada tahun 1967.

d. Raja Khalid, putra Raja Abdul Aziz ibnu Saud (1975-1982)

Khalid dilantik menjadi Putera Mahkota pada tahun 1965 selepas kakaknya (kakak kandung) yaitu Muhammad ibn Abdul Aziz al Sa'ud menolak untuk menjadi raja. Ia tidak begitu berminat dengan politik dan memberikan kekuasaan pemerintahan kepada adik tirinya itu. Beliau menyusun kembali Majelis Menteri-menteri pada tahun 1975, Raja Khalid juga membuat keputusan untuk membawa masuk buruh asing ke dalam negara untuk membantu pembangunan negara. Raja Khalid meninggal dunia akibat serangan jantung. Ia digantikan oleh Putera Mahkota yaitu Fahd.

e. Raja Fahd, putra Raja Abdul Aziz ibnu Saud (1982-2005)

Pada tahun 1953, dalam usia 30 tahun, Fahd dilantik sebagai Menteri Pendidikan oleh ayahnya, Raja Abdul Aziz ibn al-Saud. Kemudian pada tahun 1962 dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Lima tahun kemudian, Fahd menjadi Wakil Perdana Menteri Kedua. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal dibunuh keponakannya dan Raja Khalid naik takhta. Fahd dipilih menjadi Putra Mahkota dan Wakil Perdana Menteri Pertama. Pada masa-masa akhir pemerintahan Raja Khalid, Fahd dipandang sebagai perdana menteri *de facto*. Saat Raja Khalid meninggal dunia pada 13 Juni 1982, Fahd menjadi penerus takhta. Dia membangun ekonomi Arab Saudi dan menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah Amerika Serikat. Raja Fahd terkena stroke pada tahun 1995 dan kondisinya melemah. Tugas menjalankan kerajaan pun diberikan kepada Putera kota Abdullah. Raja Fahd wafat pada 1 Agustus 2005.

Dalam banyak kesempatan dinasti Saudi menerima dukungan publik dan sepenuh hati dari para ulama. Setiap tahun raja-raja membantu membersihkan Ka'bah dan ritual ibadah haji. Dengan demikian mereka menghubungkan diri mereka dengan simbol-simbol Islam yang paling suci. Kebijakan luar negeri Arab Saudi sejak penaklukan Mekah pada 1920-an telah ditujukan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam, mengurangi ketegangan antara negara-negara Muslim, dan mengurangi ketakutan asing yang tidak menyukai doktrin Wahhabi untuk mempromosikan ziarah. Sebelum munculnya pendapatan minyak yang besar, Kerajaan bergantung pada ziarah sebagai sumber pendapatan utama. Meskipun ada beberapa konflik di tahun 1920-an dengan kelompok-kelompok dan negara-negara bagian yang ingin ikut campur dalam pengelolaan ziarah, Abd al-Aziz segera mendirikan otoritasnya sendiri yang tidak diungkapkan atas haji dan masalah-masalah terkait. Pada tahun 1957 Arab Saudi telah memperoleh kendali penuh atas kesehatan para peziarah. Konflik dengan negara-negara Muslim yang berbatasan sangat minim dibandingkan dengan hubungan internasional yang panas dan tegang yang telah ada antara sebagian besar negara Timur Tengah pada abad ini (William ochsenwald, 1981).

Tahun 2005 hingga 2015, Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud secara bertahap memodernisasi Kerajaan. Didorong oleh ideologi pribadi dan pragmatisme politik, ia memperkenalkan serangkaian inisiatif sosial dan ekonomi, termasuk memperluas lapangan kerja dan peluang sosial bagi perempuan, menarik investasi asing, meningkatkan peran sektor swasta dalam ekonomi, dan mencegah bisnis dari mempekerjakan pekerja asing. Reformasi ini telah dipercepat di bawah Raja Salman bin Abd al-Aziz, yang naik takhta pada tahun 2015, dan sejak itu mencabut larangan Kerajaan atas mengemudi perempuan dan memungkinkan bioskop untuk beroperasi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Arab Saudi melihat beberapa protes selama Musim Semi Arab 2011 tetapi bukan tingkat pertumpahan darah yang terlihat dalam protes di tempat lain di wilayah tersebut. Muslim Syiah di Provinsi Timur melakukan protes terutama terhadap penahanan tahanan politik, diskriminasi endemik, dan tindakan Bahrain dan Pemerintah Saudi di Bahrain. Riyadh mengambil pendekatan yang hati-hati tetapi tegas dengan menangkap beberapa pemrotes tetapi membebaskan sebagian besar dari mereka dengan cepat dan dengan menggunakan ulama yang disponsori negara untuk melawan aktivisme politik dan Islamis (CIA, 2015).

Dengan membaca kisah perjuangan dakwah syekh Muhammad Bin Abdul Wahhab bersama Muhammad bin Su'ud yang kemudian bertahan hingga hari ini, telah menepis semua tuduhan terhadap beliau, termasuk tuduhan dengan kata "wahabi" sebagai pemberontak. Sebab beliau hanya berjuang untuk menegakkan kalimat Tauhid *la ilaaha illallah dan Muhammad Rasulullah*. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beserta keturunannya dan orang-orang yang bersamanya sepatutnya mendapatkan dukungan dari kaum muslimin. Oleh karena itu, segala bentuk permusuhan terhadap pemerintahan dinasti Saudi adalah permusuhan terhadap kebenaran dan juga permusuhan terhadap tauhid. Coba, pemerintahan mana yang sekarang memerintah dengan dilandasi tauhid?, apakah mesir? Syam? Irak?. Pemerintahan mana yang memerintah kepada tauhid hari ini? dan pemerintahan mana pula yang menegakkan syariat islam selain pemerintahan arab Saudi? (Utsaimin, 2012b)

Wahhabisme telah dicap sebagai bid'ah oleh lawan-lawannya, tetapi tujuan pendiri adalah untuk kembali ke ajaran Islam awal. Penentangan terhadap ajarannya, memaksa ibn 'Abd al-WahMb untuk berlindung dengan Muhammad ibn Sa'ud, Amir dari Dir'iyah. Pada 1745 ibn Sa'ud membentuk aliansi dengan ibn 'Abd al-Wahhab di mana keduanya sepakat untuk memberantas bid'ah dan mengembalikan Islam murni ke Arab. Dengan diterimanya doktrin Wahhabi, ibn Sa'ud menjadi *imam* (pemimpin) dari komunitas Unitarian, dengan demikian wajib menegakkan *syariah* (hukum Islam) dan untuk menyebarkan agama islam (Edens & Edens, 2012). Melalui dakwah syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, arab Saudi menjalankan syariat yang murni dan bersih dalam berbagai aspek. Seperti dalam aspek keyakinan, hukum, gaya hidup, sanksi-sanksi peradilan, perekonomian dan lain sebagainya. Karena itu, sebagian sejarawan, ketika menyinggung tentang dakwah ini, mengatakan "sepanjang sejarah islam, sejak kurun terbaik berakhir, belum pernah terjadi dijazirah arab pelaksanaan syariat islam dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang telah terjadi pada masa pemerintahan dinasti Saudi. Mereka benar-benar telah menolong dan mendukung dakwah" (Utsaimin, 2012b)

Perjuangan yang mereka lakukan adalah perjuangan yang pernah dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah yaitu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, sekitar 1500 abad yang lalu bersama dengan para sahabatnya, hingga sampai pada runtuhnya kerajaan

utsmânia yang kemudian diambil alih oleh orang-orang yang melepaskan hukum Islam. Hingga kemudian direbut kembali dan berdirilah kerajaan Arab Saudi.

Budaya Kewarganegaraan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal pembahasan tulisan ini bahwa kerajaan Arab Saudi merupakan Negara monarki absolut dengan menjadikan Alquran sebagai konstitusi negara. Berbicara tentang konstitusi tentu sangat berkaitan erat dengan budaya kewarganegaraan suatu bangsa. Sebagaimana kita tau bahwa budaya kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan suatu proses pembudayaan proses pembinaan watak dan karakteristik. Hal ini juga tidak terlepas dari bagian suatu proses dan budaya politik. Dalam hal kepemimpinan, Arab Saudi dipegang oleh seorang raja yang secara turun temurun mewarisi kerajaan Arab Saudi. Sistem yang sama ini masih berlaku sampai sekarang dan tidak memungkinkan pemilihan atau partai politik, mereka tidak menggunakan system demokrasi buatan barat (Nevo, 1998b). Dalam pengambilan keputusan baik social maupun politik sangat dipengaruhi oleh kekuatan para ulama di samping raja. Sebagai orang yang dianggap paling mengerti tentang agama, fatwa mereka menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan kerajaan. *Ulama* adalah lembaga pemegang kekuasaan utama lainnya dalam politik Saudi karena peran dominan Islam yang disebutkan di atas dalam semua aspek pemerintahan dan masyarakat Saudi (R. Ismail et al., 2016).

System pemerintahan monarki Saudi adalah monarki sejati yang mengakomodasi Islam. Ini digambarkan sebagai 'theo-monarki' yang dibentuk oleh agama dan norma-norma agama-budaya yang sudah lama ada. Ini didasarkan pada kompromi yang sedang berlangsung antara dua otoritas utama, lembaga keagamaan yang ada dan monarki Saudi. Dengan kata lain, selama kerja sama mereka, para *ulama* mempertahankan peran sentral dalam melestarikan fitur keagamaan negara, tidak hanya dalam ranah sosial, tetapi juga dalam ranah politik.. Raja, di sisi lain, terus mempertimbangkan pendapat *ulama*, berkonsultasi dengan mereka dan mencatat kepentingan mereka. *Ulama* menempati posisi penting dalam elit politik negara, tak tertandingi di negara mana pun di Dunia Muslim Sunni kontemporer. Para *mufti*, anggota hierarki agama yang paling terkemuka, khususnya menikmati kekuasaan dan otoritas yang tidak pernah diimpikan oleh rekan-rekan mereka di negara-negara Muslim lainnya. Otoritas *mufti* dihormati oleh raja-raja Saudi karena raja Saudi memberikan sanksi *fatwa* (pendapat hukum) sebagai pengesahan atas keputusan mereka sendiri (Nevo, 1998b).

Sehingga pemahaman sekuler yang ingin memisahkan agama dan politik perlu untuk dipertanyakan. Sebab, di Arab Saudi, pola "orientasi agama-politik" ini telah ada sejak 1744, mengikuti aliansi antara Muhammad ibn Abd al-Wahhab dan Muhammad ibn Sa'ud (Kechichian, 1986). Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyyah "mengajarkan bahwa jika agama dan kekuasaan dipisahkan, kekacauan akan menghasilkan Negara" (Joseph Schacht and C. E. & Bosworth, 1974). Ketidakpastian dalam masalah legislatif sebelum pendirian "corpus juris" Muslim, dan penutupan pintu *ijtihad* serta tidak adanya badan legislatif, telah mengubah status yuridis para qadi dalam Islam. Menjelang abad kedua Islam, kantor qadi bukan hanya aplikator hukum, tetapi juga pencipta atau juru hukum. Menurut Emile Tyan, transformasi status qadi ini sebagai penerjemah hukum membentuk dasar dari mana organisasi yuridis Islam telah disempurnakan, yang mengarah ke *shuhud*, notaris, *wakaf*, dan badan-badan serupa lainnya (Emile Tyan, 1960).

Kerajaan Arab Saudi merupakan Negara yang dijadikan kiblat peradaban islam seluruh dunia. Segala aspek kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan budaya agama islam. Sehingga sangat wajar para *ulama* mempertahankan kerja sama mereka dengan penguasa dan terus memberikan pengaruh di beberapa bidang, termasuk hampir semua urusan hukum dan agama. Mereka bahkan berhasil meningkatkan kekuasaan mereka dari waktu ke waktu dengan memperluas kendali mereka atas kementerian dan lembaga agama lain, seperti Kementerian Kehakiman, Kementerian Urusan Islam dan Wakaf, Panggilan dan Bimbingan, Kementerian Ziarah, Komite Komando Yang Baik dan Melarang Kekeliruan, Khotbah dan Bimbingan Islam di Rumah dan Di Luar Negeri, pengawasan pendidikan anak perempuan, notaris publik, pengawasan masjid dan *wakaf* (perwalian amal), dan akhirnya Liga Muslim Dunia dan Majelis Dunia Pemuda Muslim. Dengan demikian, di Arab Saudi, para *ulama* terus memainkan peran penting, setidaknya dalam mempengaruhi kebijakan sosial dan internal, dan dalam membentuk fasad sosial budaya Arab. Selain itu, di Arab Saudi pendapat agama-hukum (*fatwa*, *fatawa*) masih digunakan, tidak hanya sebagai dasar legitimasi untuk kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen dalam implementasinya, seperti yang disaksikan di setidaknya dua bidang berbeda: undang-undang dan pengesahan keputusan politik. (Al-Atawneh, 2009)

Contoh *fatwa* di Arab Saudi yaitu melarang perempuan mengemudi, ini *Fatwa* dikeluarkan pada tahun 1990 dan dibuat menjadi undang-undang oleh Saudi Kementerian Dalam Negeri. Ini didasarkan pada kutipan dari Alquran dan tradisi Islam. Selanjutnya fatwa mengenai pernikahan, dalam hukum Islam, mahar merupakan salah satu syarat '*aqd nikah* (akad nikah). Namun, jumlah uang yang tepat, yang tidak ditentukan oleh hukum Islam, ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kontrak pernikahan, sesuai dengan '*urf* (adat setempat), kondisinya harus kondusif untuk pemenuhan persyaratan menikah, salah satu resep terpenting dalam Islam (untuk mencegah fenomena negatif, seperti prostitusi (*zina*)). Oleh karena itu, fatwa tersebut melarang penolakan proposal pernikahan atas nama anak perempuan atau saudara perempuan untuk alasan yang tidak sah. Terdapat daftar panjang yang telah ditetapkan untuk meringankan pemuda yang belum mampu dari segi finansial namun telah meminta izin untuk menikah. Seperti misalnya dana yang dijamin oleh pemerintah untuk pernikahan. Contoh yang lain dimana wanita Saudi dilarang tampil berpakaian dengan cara yang tidak sesuai *syariah* jadi wanita harus menutupi seluruh tubuh mereka, termasuk wajah mereka, hanya menyisakan mata mereka yang terbuka.

Selanjutnya undang-undang tentang hukuman atas pelanggaran juga sesuai dengan hukum islam, seperti hukum rajam bagi wanita yang berzina, potong tangan bagi pencuri, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, hukuman harus disesuaikan dengan beratnya pelanggaran, tetapi bahkan hukuman mati dapat dikenakan jika keadaan mengharuskannya. Sebagaimana disebutkan, serangkaian hukuman baru dan panjang telah diperkenalkan di Arab Saudi; hanya sebagian dari mereka yang melakukan pelanggaran yang dapat dihukum menurut Al-Qur'an (Layish, 2015). Dan undang-undang sosial yang ketat dan sangat ketat seperti itu tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk menunjukkan kepatuhan raja Saudi terhadap aturan *syariah*.

Selanjutnya dalam bidang pendidikan, Pengaruh *ulama* dalam bidang pendidikan dan sosial sangat terasa dalam hal pendidikan perempuan dan peran perempuan dalam kehidupan publik. Pembentukan dan perluasan pendidikan perempuan ditentang oleh kekuatan sosial paling konservatif. Sebagai kompromi dan untuk menenangkan *ulama*,

pendidikan perempuan ditempatkan di bawah pengawasan dikendalikan oleh para *ulama* Presidensi Umum Pendidikan Anak Perempuan.(Prokop, 2003). Selain itu pembelajaran pendidikan Agama sedikitnya sekitar 24-35 % dalam system pendidikannya. Pendidikan ini menitik beratkan pada pembejaraan Al-Quran, Tauhid, Tafsir, Hadits dan sirah atau kisah-kisah perjuangan islam. Hal ini tentu bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan karakter bangsa mereka sebagai Negara dengan konsep hukum islam.

Menurut (Prokop, 2003), Islam terus menjadi sumber legitimasi utama untuk keluarga al-Saud, dan pendidikan agama ditekankan di semua tingkatan di Arab Saudi. Menurut kebijakan Pendidikan di Arab Saudi, tujuan pendidikan adalah sebagai berikut: memahami Islam dengan benar dan lengkap, menanamkan dan menyebarkan doktrin Islam, memberikan siswa nilai-nilai dan instruksi Islam, memperoleh pengetahuan bersama dengan keterampilan yang berbeda, mengembangkan kecenderungan perilaku konstruktif; memajukan masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan memungkinkan siswa untuk menjadi berguna dalam pembangunan masyarakat mereka (kebijakan Pendidikan pasal 28) (Rabaah et al., 2016).

Pemerintah telah membuat konsesi kepada otoritas agama di bidang budaya, pengembangan kurikulum, dan kontrol atas peralatan pendidikan. Misalnya, cara sejarah diajarkan di sekolah-sekolah Saudi mencerminkan tujuan pemerintah untuk menyatukan populasi dan menciptakan identitas Saudi yang sama. Pemerintah menjadi lebih sadar akan dampak dari apa yang diajarkan di sekolah-sekolah Saudi. Dengan demikian, pemerintah berupaya menghapus apa yang dianggap sebagai pesan yang tidak menyenangkan. Ini juga membuat upaya untuk mengubah metode pengajaran, memperkenalkan teknologi modern, mengurangi hafalan, dan mendorong pemikiran analitis. Oleh karena itu, menteri luar negeri Saudi menyimpulkan bahwa sistem pendidikan di Arab Saudi tidak dapat dianggap sebagai peternak terorisme. Memang, kebijakan pendidikan Saudi memegang siswa mereka dengan kriteria berikut: "1) Mewakili moral Islam terpuji dalam diri sendiri dan dengan orang lain, 2) interaksi positif dengan budaya lain, 3) dan interaksi yang bijaksana dan jujur dengan orang lain" Banyak tujuan pendidikan di Arab Saudi didasarkan pada kata-kata Al-Quran dan Sunnah, tulisan-tulisan nabi Muhammad (Al-Sunbul et al., 2004).

Di semua sekolah Saudi, untuk anak perempuan dan laki-laki, kebijakan pendidikan diterapkan untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan agama, ekonomi dan sosial negara dan untuk memberantas buta huruf di kalangan orang dewasa Saudi. Namun perselisihan tentang pendidikan wanita di arab saudi telah menjadi topic utama pada tahun 1950. Sehingga banyak cendekiawan yang turut membuat tulisan tentang diskriminasi wanita arab Saudi. Hatoon Al-fassi adalah profesor sejarah wanita di King Saud University; dia adalah salah satu aktivis hak-hak perempuan Arab Saudi yang paling vokal. Dia secara teratur menyatakan bahwa pendidikan tidak merata dan bahwa perempuan selalu dirugikan Sikap sosial umum di Arab Saudi sangat sulit untuk diubah karena negara itu memungkinkan lingkungan yang dilembagakan di mana tindakan individu untuk perubahan selalu diabaikan. Perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan begitu melekat dalam masyarakat sehingga para politisi tidak dapat melewati kontroversi terkait dengan hak-hak perempuan dan kemampuan perempuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara (Hamdan, 2005).

Memang benar bahwa Islam menetapkan beberapa aturan untuk mengatur gerakan, pakaian, dan pidato perempuan, tetapi tidak ada tempat yang secara tegas melarang mereka untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi, sosial atau politik. Ketika

kondisi ekonomi terus berubah dengan berlalunya waktu, Islam, sesuai dengan karakternya sebagai agama universal, tidak menetapkan aturan baku mengenai perpindahan perempuan di luar rumah mereka dan partisipasi bersama mereka dengan laki-laki dalam kegiatan politik, sosial dan ekonomi. Arab Saudi mempertimbangkan sikap Islam terhadap perempuan dan kehidupan sosial, dan menerapkan sikap ini pada kebijakan pendidikannya. Untungnya negara ini memiliki kemampuan untuk menciptakan sistem pendidikan anak perempuan yang terpisah, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan mereka. Sistem pendidikan Saudi menyediakan pelatihan agama, moral dan intelektual yang dirancang untuk menciptakan warga negara yang sadar akan hak-hak mereka dan kewajiban mereka kepada masyarakat. Pendidikan adalah Pendidikan gratis di semua tingkatan, tetapi tidak wajib; namun, pemerintah mendorong semua warga Saudi untuk bersekolah (Al-Hariri, 1987).

Prestasi utama bagi Arab Saudi adalah kemajuan yang sangat signifikan dalam penyediaan pendidikan universitas untuk wanita. Pada tahun 1970, hanya ada tujuh wanita dalam kursus universitas di Kerajaan. Pada 2011, jumlah itu telah mencapai 700.000, yang mewakili lebih dari 60% dari semua pendaftaran di universitas Saudi. Selanjutnya, 25% dari pendaftaran dalam gelar master dan doktoral di universitas Saudi sekarang adalah wanita, sehingga kita bisa sangat optimis tentang kapasitas wanita untuk berkontribusi secara langsung dan positif bagi perkembangan masa depan dan kemakmuran Kerajaan. (Al-Eisa et al., 2013). Kebijakan pendidikan di Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pemahaman yang benar tentang Islam dan penanaman dan penyebaran kepercayaan Islam; pengisian siswa dengan nilai-nilai, doktrin dan cita-cita Islam; menanamkan berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan; perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; dan persiapan individu untuk menjadi peserta yang berguna dalam pembangunan masyarakat.

Namun, sangat mudah bagi para ulama terkemuka untuk membungkam suara perempuan demi Islam di Arab Saudi; bahkan, sistem pendidikan Saudi menyoroti doktrin dan nilai-nilai Islam. Hal ini adalah kesalahpahaman bahwa Islam memperlakukan wanita secara tidak adil; sebenarnya, ajaran Islam sangat menghormati perempuan. Pendidikan seharusnya diberikan kepada semua Muslim, seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, "Setiap Muslim pria dan wanita, diminta untuk mencari ilmu, sehingga kedua jenis kelamin sama dalam mencari pendidikan" (Al-Hariri, 1987). (Hamdan, 2005) menyebutkan, "Salah satu istri Nabi Muhammad, Aisyha, memimpin pasukan 30.000 tentara, memasak untuk mereka, dan membantu mengobati mereka. Aisyha menegosiasikan berbagai masalah dan masalah politik dengan Nabi Muhammad, yang dengan bebas mengakui kebijaksanaannya. Wanita Saudi hidup nyaman dengan ideologi yang diuraikan dalam Al-Quran dan karenanya merasa nyaman memperjuangkan hak-hak dasar mereka dalam masyarakat. Banyak yang tidak menyadari *bahasa yang sah* dari sekte-sekte keagamaan yang sebenarnya menantang ketidaksetaraan gender. Perempuan dapat dengan tepat menggunakan sumber ini untuk membuktikan nilai mereka kepada komunitas yang berpikiran sempit (Hamdan, 2005).

Membahas pengaturan pendidikan di Arab Saudi dan menjelaskan sebuah divisi dalam pembelajaran berdasarkan gender dan hubungan kekuatannya. Arab Saudi menggunakan kekayaan minyaknya untuk mendanai pendidikan perempuan yang efektif yang diatur dalam batas-batas Islam tradisional. Negara ini mengikuti model yang didasarkan pada: (1) sistem ganda pendidikan pria dan wanita; (2) kebijakan pendidikan

khusus gender yang menekankan fungsi domestik perempuan; (3) sekolah dan perguruan tinggi yang dipisahkan gender; dan (4) diferensiasi kurikulum di berbagai tingkat pendidikan. (El-Sanabary, 1994) mengemukakan bahwa filsafat pendidikan Saudi, mikrokosmos dari masyarakat Arab Saudi, telah dengan sengaja melembagakan mekanisme-mekanisme ini sebagai alat kontrol sosial. Jadi, meskipun keadaan ekonomi dan pendidikan perempuan telah disempurnakan, pembagian gender masih perlu diperiksa ulang (Alsuwaida, 2016). Hal ini membuktikan bahwa pendidikan untuk wanita di Arab Saudi tidak dikekang, mereka tetap diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan namun tetap sesuai dengan batas kodrati sebagai wanita. Seperti yang dikatakan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud bahwa negara itu tidak dapat maju secara ekonomi dan sosial tanpa bantuan perempuan (Mills, 2009).

Hal ini tentunya dilakukan bukan tanpa alasan. Pendidikan yang diciptakan semata-mata untuk mempertahankan nasionalisme masyarakat Saudi, agar rasa cinta terhadap Negara semakin bertambah dan mampu berkontribusi untuk memajukan negaranya dalam berbagai aspek termasuk pendidikan. Sebagai kesimpulan, Islam mendorong laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja untuk memiliki kehidupan yang baik. Islam tidak memiliki pernyataan khusus tentang memisahkan laki-laki dari perempuan di bidang pendidikan dan tenaga kerja. Tapi itu bersikeras mempertahankan wanita dalam posisi yang memastikan kehidupan keluarga mereka yang stabil. Sehingga tetap dalam koridor syariat yang ditetapkan dalam Al quran sebagai konstitusi bagi negara Arab Saudi. Hal ini juga sesuai dengan budaya Arab Saudi sebagaimana disebutkan bahwa "Budaya memainkan peran utama dalam proses belajar dan mengajar" (Nouraldeem, A. S., & Elyas, 2014).

Dan perlu ditekankan bahwa, Ideologi nasional Arab Saudi didasarkan pada mazhab Islam Sunni, yaitu mazhab Hanbali. Ulama, sebagai otoritas agama tertinggi, setidaknya secara teoritis bertanggung jawab untuk menafsirkan Islam dan dengan demikian dianggap sebagai kekuatan dominan dalam politik Saudi. Meskipun Raja adalah kepala dalam setiap pergerakan saat ini dan memiliki kekuatan politik yang jauh lebih besar daripada ulama, namun kedudukan ulama Saudi yang tinggi di dunia Muslim adalah tanggung jawab terhadap tempat-tempat suci Muslim di Hijaz. Dengan demikian mereka adalah pihak yang berupaya mendamaikan perselisihan dan mempertahankan front persatuan melawan ancaman politik (Bligh, 1985).

KESIMPULAN

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara monarki absolut yang berdiri di atas fondasi keagamaan Islam dan tradisi politik Dinasti Saud. Sejak didirikan oleh Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud pada tahun 1932, identitas nasional Arab Saudi secara konsisten dibangun atas integrasi antara kekuasaan politik dan legitimasi keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya melalui mazhab Hanbali dan pemikiran reformis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kolaborasi historis antara gerakan keagamaan Wahhabi dan Dinasti Saud menjadi basis ideologis terbentuknya negara yang berorientasi pada penerapan syariat Islam sebagai hukum tertinggi, menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah bukan sekadar pedoman moral, tetapi juga konstitusi negara.

Dari perspektif historis, Arab Saudi mengalami proses konsolidasi politik dan keagamaan yang panjang sejak masa Dir'iyah hingga berdirinya kerajaan modern pada abad ke-20. Transformasi dari entitas kesukuan menuju negara terpusat berhasil

diwujudkan melalui penyatuan wilayah-wilayah seperti Najd dan Hijaz, serta penguatan simbol-simbol nasional yang berakar pada Islam. Monarki absolut yang dijalankan oleh keluarga Al-Saud memperoleh legitimasi tidak hanya melalui kekuasaan politik, tetapi juga melalui otoritas ulama dan struktur sosial-religius masyarakat. Dengan demikian, Arab Saudi menampilkan model negara teokratis-modern yang unik, di mana agama berfungsi sebagai fondasi identitas nasional, legitimasi politik, serta panduan normatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Sejarah panjang hubungan antara kekuasaan politik Dinasti Saud dan ajaran Islam memperlihatkan bagaimana agama tidak hanya menjadi unsur spiritual, tetapi juga kekuatan institusional yang membentuk karakter, hukum, dan kebijakan negara hingga masa kini. Dalam konteks budaya kewarganegaraan, Arab Saudi menampilkan model unik dari negara teokratis-modern, di mana sistem pemerintahan monarki absolut berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Hubungan simbiotik antara kekuasaan politik Dinasti Saud dan otoritas keagamaan ulama telah membentuk identitas nasional yang menempatkan agama sebagai pemandu utama dalam setiap aspek kehidupan publik. Peran ulama tidak hanya terbatas pada penetapan hukum dan fatwa, tetapi juga meluas ke bidang pendidikan, sosial, dan kebijakan publik, sehingga agama menjadi instrumen pembentukan karakter bangsa dan legitimasi politik.

Pendidikan di Arab Saudi dirancang untuk memperkuat identitas keislaman dan nasionalisme, dengan kurikulum yang menitikberatkan pada nilai-nilai Al-Qur'an, tauhid, hadis, dan sejarah Islam. Meski terdapat pembagian gender dalam sistem pendidikan, kebijakan ini diorientasikan untuk menegaskan peran perempuan sesuai kodrat Islam tanpa meniadakan hak mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Peningkatan jumlah perempuan di pendidikan tinggi dan dunia kerja menandai pergeseran sosial yang signifikan dalam masyarakat Saudi modern. Arab Saudi berhasil menyeimbangkan antara kemajuan negara dan konservatisme religius. Negara ini menjadi representasi dari keberhasilan integrasi antara syariat Islam dan stabilitas politik monarki. Dengan mempertahankan fondasi agama sebagai dasar ideologi nasional, Arab Saudi tidak hanya memperkokoh posisinya sebagai pusat spiritual dunia Islam, tetapi juga sebagai aktor penting dalam sosial global kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atawneh, M. (2009). Is Saudi Arabia a Theocracy? Religion and Governance in Contemporary Saudi Arabia. *Middle Eastern Studies*, 45(5), 721–737. <https://doi.org/10.1080/00263200802586105>
- Al-Eisa, E. S., Smith, L., & Alamri, M. (2013). Higher Education in Saudi Arabia. In *Journal of Higher Education Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-6321-0>
- Al-Hariri, R. (1987). Islam's Point of View on Women's Education in Saudi Arabia. *Comparative Education*, 23(1), 51–57. <https://doi.org/10.1080/0305006870230106>
- Al-Rasheed, M. (2010). *A history of Saudi Arabia*. Cambridge university press.
- Alsuwaida, N. (2016). Women's Education In Saudi Arabia. *Journal of International Education Research (JIER)*, 12(4), 111. <https://doi.org/10.19030/jier.v12i4.9796>
- Anderson, B. (2020). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. In *The new social theory reader* (pp. 282–288). Routledge.
- Bligh, A. (1985). Alexander Bligh THE SAUDI RELIGIOUS ELITE (ULAMA) AS PARTICIPANT IN THE POLITICAL SYSTEM. 17, 37–50.
- Commins, D. (2005). *The wahhabi mission and Saudi Arabia*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.

- Edens, D. G., & Edens, D. G. (2012). *The Anatomy of the Saudi Revolution* ANATOMY OF THE SAUDI REVOLUTION *. 5(1), 50–64.
- Emile Tyan. (1960). *Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam*.
- F. Vogel. (2014). *Islamic Law and Legal System : Studies of Saudi Arabia* by Frank E . Vogel Review by: Ron Shaham Published by: American Oriental Society American Oriental Society is collaborating with JSTOR to digitize , preserve and extend access to *Journal of the Amer.* 122(3), 646–648.
- Gellner, E. (2015). Nations and nationalism. In *Conflict after the Cold War* (pp. 378–389). Routledge.
- Hamdan, A. (2005). Women and education in Saudi Arabia: Challenges and achievements. *International Education Journal*, 6(1), 42–64.
- Ismail, R., Lai, Y. M., Ayub, Z. A., Ahmad, A. R., & Da Wan, C. (2016). Kingdom of Saudi Arabia. In *Higher Education in the Middle East and North Africa: Exploring Regional and Country Specific Potentials* (pp. 127–146). https://doi.org/10.1007/978-981-10-1056-9_7
- Joseph Schacht and C. E., & Bosworth. (1974). *The Legacy of Islam*.
- Kechichian, J. A. (1986). *Joseph A . Kechichian THE ROLE OF THE ULAMA IN THE POLITICS OF AN ISLAMIC STATE : THE CASE OF SAUDI ARABIA*. 18, 53–71.
- Layish, A. (2015). *Linked references are available on JSTOR for this article : SAUDI ARABIAN LEGAL REFORM AS A MECHANISM TO MODERATE WAHHABI DOCTRINE* *. 107(2), 279–292.
- Mills, A. (2009). Reforms to Women's Education Make Slow Progress in Saudi Arabia Jeddah, Saudi Arabia. *Chronicle Of Higher Education*, 55(43), 11.
- Nevo, J. (1998a). Religion and national identity in Saudi Arabia. *Middle Eastern Studies*, 34(3), 34–53. <https://doi.org/10.1080/00263209808701231>
- Nevo, J. (1998b). Religion and national identity in Saudi Arabia. *Middle Eastern Studies*, 34(3), 34–53. <https://doi.org/10.1080/00263209808701231>
- Nouraldean, A. S., & Elyas, T. (2014). *Learning English In Saudi Arabia: A Socio-Cultural Perspective*.
- Prokop, M. (2003). Saudi Arabia: The politics of education. *International Affairs*, 79(1). <https://doi.org/10.1111/1468-2346.00296>
- Rabaah, A., Doaa, D., & Asma, A. (2016). Early Childhood Education in Saudi Arabia: Report. *World Journal of Education*, 6(5), 1–8. <https://doi.org/10.5430/wje.v6n5p1>
- Ramady, M. A. (2018). *Saudi Aramco 2030*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-67750-7>
- Smith, A. D. (1999). *Myths and Memories of the Nation*. Oxford University Press.
- Utsaimin, A. Bin. (2012a). *Kerajaan Arab Saudi: sejarah dakwah dan politik* (Vol. 1). Toobagus Publishing .
- Utsaimin, A. Bin. (2012b). *Kerajaan Arab Saudi: sejarah dakwah dan politik* (Vol. 2). Toobagus Publishing .
- William ochsenwald. (1981). Saudi Arabia and the Islamic Revival. *International Journal of Middle East Studies*, 13(1981), 271–286.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhur, S. (2011). *Saudi Arabia*.